GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar	**: SUARA PEMBARUAN**	**Tanggal**	**: 30 AGUSTUS 2006**
Subyek	**:KEBAKARAN HUTAN**	**Hari**	**: RABU**
		Halaman	**: 5**

. Menneg LH : Lahan Pembakar Hutan Akan Disita

[BATAM] Kementerian Lingkungan Hidup(LH) akan mengeluarkan peraturan baru soal kerusakan lingkungan hidup, yaitu menyita lahan selain memproses pelaku pembakaran hutan dan lahan.

"Kelak secara gamblang di peraturan itu akan diatur tidak hanya menangkap pelaku, tetapi juga menyita lahannya dan tidak boleh diolah lagi baik lahan baru maupun lama," tegas Menteri Negara (Menneg) Rachmat Witoelar, kepada pers di Batam, Selasa (29/8).

Seperti dilansir *Antara*, Rachmat Witoelar mengatakan, untuk sementara ini ada beberapa perusahaan yang izin pengelolaannya telah dicabut, di antaranya PT Torganda dan Jatim Jaya Perkasa. "Saya tidak peduli siapa saja akan saya hantam," tegasnya.

Berdasarkan hasil operasi pencegahan kebakaran hutan pada beberapa bulan ini, Kementerian LH telah menyerahkan proses hukum pembakaran hutan dan lahan kepada kepolisian. Bahkan, katanya, Kementerian LH telah menyita ribuan hektare hutan yang terbakar milik beberapa perusahaan sebagai barang bukti.

"Penyerahan perusahaan pembakaran hutan dan lahan kepada kepolisian merupakan bukti bahwa kementerian menindak tegas pelaku perusak lingkungan, tanpa pilih-pilih," katanya.

Walhi

Sementara itu Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dalam siaran pernya di Jakarta, Selasa menyayangkan pernyataan sejumlah pejabat yang cenderung menyalahkan petani tradisional sebagai pelaku utama pembakaran hutan dan menafikan fakta bahwa justru pelaku bisnislah yang menerima keuntungan paling besar dari dari pembersihan lahan dengan cara membakar tersebut.

"Walhi melihat sejumlah pernyataan yang dikeluarkan pejabat cenderung menyalahkan peladang tradisional, padahal angka pembukaan kebun dengan cara membakar yang dilakukan oleh masyarakat tidak signifikan," kata Pengkampanye Hutan dan Perkebunan Walhi Rully Syumanda, di Jakarta. [M-15]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup